

---

## FAKTOR-FAKTOR EKOLOGI ADMINISTRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh

Hilman Fitriani Akbar<sup>1</sup>), Hukman Faathir Turmuji<sup>2</sup>), Melania Dwi Lestari<sup>3</sup>),  
Muhammad Abdul Jabbar<sup>4</sup>) & Abdal<sup>5</sup>)

<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: <sup>1</sup>[hilmanfitriani@gmail.com](mailto:hilmanfitriani@gmail.com), <sup>2</sup>[hukman.faathir@yahoo.com](mailto:hukman.faathir@yahoo.com),  
<sup>3</sup>[melaniadwilestari@gmail.com](mailto:melaniadwilestari@gmail.com), <sup>4</sup>[muhammad@gmail.com](mailto:muhammad@gmail.com) & <sup>5</sup>[abdal70@gmail.com](mailto:abdal70@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor - faktor ekologi dalam administrasi publik khususnya di dalam konteks pemerintahan daerah (Studi Kasus di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).. Faktor ekologi seperti sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan sangat berperan penting dalam Administrasi maupun pada sistem pemerintahan daerah. Masalah penelitian ini adalah suatu faktor ekologi terhadap sistem pemerintahan daerah. Peneliti mengambil salah satu faktor ekologi yang akan menjadi penelitian yaitu factor agama. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan administrasi publik dalam konteks pemerintahan daerah sangat diperlukan kemapanan dari administrasi publik dalam menghadapi perubahan dari faktor faktor ekologi sehingga menimbulkan kestabilan dalam pelaksanaan administrasi negara itu sendiri.

**Kata Kunci : Faktor Ekologi, Administrasi Publik & Pemerintahan Daerah**

### PENDAHULUAN

Faktor ekologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan administrasi publik di seluruh Negara yang sedang berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. Ekologi administrasi Negara atau yang dapat dikatakan sebagai faktor lingkungan dalam pelaksanaan administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dapat dikatakan demikian karena tujuan dari Administrasi Negara adalah pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

Faktor faktor ekologi yang senantiasa ada dalam administrasi negara khususnya pada pemerintahan daerah antara lain Politik, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Hukum, Agama, dan Pertahanan Keamanan. Adapun fungsi negara yang terdapat dalam UUD 1945 alinea ke 4 yakni sebagai berikut, Keamanan, Kesejahteraan, Pendidikan, Perdamaian dan Relasi.

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup

dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmu ilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari hari, terutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan.

Sejak tahun 1999 dimana mulai munculnya gerakan reformasi yang menekankan pada persoalan pelayanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diterbitkan Presiden RI.(2014). Undang Undang No 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Presiden RI, 30 September.

Dengan demikian pelaksanaan administrasi Negara ditingkat daerah seyogyanya selalu didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan lingkungan Pemerintah Daerah yang

bersangkutan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaan Administrasi Pemerintahan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Administrasi Publik, di mana faktor ekologis atau lingkungan selalu memengaruhi pelaksanaan pemerintahan di daerah khususnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Administrasi Negara khususnya dalam hubungannya dengan Administrasi Pemerintahan di Daerah, sangat dipengaruhi oleh faktor ekologis atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pelaksanaan administrasi negara di tingkat pemerintahan daerah dapat memperlancar atau menghambat proses atau kegiatan Administrasi Negara dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Faktor lingkungan yang berpengaruh dalam pelaksanaan Administrasi Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: faktor sosial budaya, agama, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan keamanan.

Administrasi Negara dalam konteks Administrasi Pemerintahan Daerah juga dapat memengaruhi lingkungannya melalui kegiatan pembinaan, pengelolaan, dan memproses kelangsungan pemerintahan di daerah agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan Administrasi Negara khususnya dalam hubungannya dengan Administrasi Pemerintahan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor ekologis atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pelaksanaan administrasi negara di tingkat pemerintahan daerah dapat memperlancar atau bahkan menghambat kegiatan administrasi negara. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Administrasi Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah adalah faktor sosial budaya, ekonomi, agama, politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dalam suatu

organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

## LANDASAN TEORI

1. Konsep Ekologi Administrasi, secara sempit berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda), meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pembuatan agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti sempit tersebut, administrasi adalah kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Dengan demikian, administrasi dapat dipandang sebagai kegiatan tata usaha, seperti mengetik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Dalam arti luas, administrasi meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Ekologi adalah cabang dari biologi yang berkenaan dengan hubungan antara kehidupan makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka, yang dalam ilmu kemasyarakatan perhubungan antara penyaluran kelompok kelompok manusia tersebut dengan penerangan sumberdaya alam berakibat terhadap pola kemasyarakatan dan budaya.
- Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal balik yang berguna) antara suatu organisme dan lingkungan sekelilingnya.
- Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme dengan lingkungan. Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini bervariasi menurut lingkungan

Menurut The Liang Gie (1980), administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendapat lain mengenai administrasi dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1994) bahwa administrasi adalah keseluruhan proses

kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan memengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, security (keamanan), dan natural resource (sumber daya alam). Peran suatu masyarakat dalam bidang politik (infrastruktur), ekonomi (pendapatan/institusi), sosial budaya (pendidikan dan agama), dan hankam (tentram/tertib) jelas sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, administrasi negara juga akan memengaruhi faktor-faktor lingkungannya, dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komarudin (1983) memandang bahwa ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme dan lingkungan. Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini bervariasi menurut lingkungan.

Sedangkan Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan "ekologi" sebagai "...tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbang-balik) antara satu organisme dan lingkungan sekelilingnya". Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti tinjauan yang mencoba menerangkan hubungan antara lingkungan (environment) tempat administrasi itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Dengan kata lain, tinjauan ekologis ingin menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya, dan pengaruh tersebut memberikan ciri-ciri khas pada administrasi.

Ekologi menurut Riggs (1980) menggambarkan interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Ekologi yang bermula dibidang biologi, berkembang guna menyelidiki ekologi manusia (human ecology) dimana ternyata manusiapun mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan

lingkungannya; ahli sosiologi mengemukakan ekologi sosial untuk menggambarkan kebiasaan manusia. Khususnya di perkotaan; Dalam interrelasinya antara pengambilan keputusan otoritatif dan lingkungannya, munculah ekologi administrasi.

2. Hubungan Sistem administrasi dengan ekologi, dapat dijelaskan bahwa apabila kita membahas administrasi sebagai suatu sistem kegiatan (sistem administrasi negara sebagai sasaran studi), maka kita dihadapkan kepada konsekuensi yang berhubungan dengan cara yang dapat dipakai untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem.

Menurut Ukasah (1987:66) merupakan gagasan dari suatu sistem yang menganjurkan bahwa kita dapat memisahkan administrasi dari kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, yang paling tidak untuk tujuan analisa. Dan memeriksa seakan-akan administrasi itu sendiri dikelilingi oleh lingkungannya, tetapi akan mudah dibedakan dari lingkungan tersebut dimana ia dioperasikan.

Dalam hubungan dengan ekologi administrasi negara, maka faktor lingkungan perlu dipilih, mana yang relevan dengan sistem administrasi negara, dimana faktor lingkungan hidup yang relevan merupakan faktor yang disebut sebagai faktor-faktor ekologis. Sebagai salah satu fenomena administrasi, belakangan ini nampak adanya pandangan yang mendua terhadap sosok dan cara kerja aparatur pemerintah di kebanyakan negara sedang berkembang, seperti diungkapkan Ginanjar Kartasasmita, (1997:72).

Pandangan Pertama melihat organisasi pemerintahan merupakan dewa penyelamat dan merupakan satu-satunya organ yang dikagumi masyarakat, ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, organisasi ini mengarahkan para intelektual dari beragam latar belakang pendidikan, sehingga keberhasilannya lebih dapat terjamin. Pandangan kedua menganggap cara kerja aparatur pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan, kurang dapat

menyesuaikan diri dengan modernisasi dan orientasi pada pembangunan dan berperilaku kurang inovatif.

Secara teoritis lahirnya gejala ini sebagai akibat logis dari adanya kecenderungan pergeseran perkembangan ilmu administrasi publik yang beralih dari *normative-science* ke pendekatan *behavioral-ekologis*. Secara empiris, gejala perkembangan masyarakat sebagai akibat dari adanya globalisasi, memaksa semua pihak, utamanya birokrasi pemerintah untuk melakukan revisi, perbaikan dan mencari alternatif baru tentang sistem administrasi yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi (budaya, ekonomi, sosial, politik dan geografi), perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman suatu bangsa.

3. Pemerintah Daerah, pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan

kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Lain hal nya dengan C.F Strong (1996) yang menyebutkan bahwa pemerintahan

daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Dasar pengaturan Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B. Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan. Menurut Faisal (1990) adalah suatu penelitian yang melukiskan atau mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan sejumlah masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Dalam lokasi penelitian ini penulis meneliti di Kantor Kecamatan Dau, Malang. Teknik pengumpulan data dari beberapa jurnal dan buku juga untuk diterapkan dalam suatu artikel ini. Informan penelitian terdiri dari sumber web di kecamatan Dau, Malang yang terdapat data – data yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor – Faktor Ekologi Administrasi Negara

Sudah menjadi hukum dalam ilmu administrasi bahwa administrasi dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan saat sekarang ini yang sedang mengalami proses perubahan yang cepat. Lingkungan senantiasa berubah, namun perubahan yang sedang berlangsung berjalan dalam tempuh yang lebih cepat. Perubahan ini berlangsung disemua aspek kehidupan, bersifat lintas sektoral dan lintas disiplin. Perubahan yang berlangsung secara global. Ia menyangkut perubahan yang amat mendasar yaitu perubahan nilai-nilai, bahkan universalisasi nilai-nilai. Perubahan sistem nilai masyarakat akan mempengaruhi pula terhadap perkembangan administrasi.

Perkembangan Kabupaten/Kota selalu dipengaruhi oleh faktor ekologis atau faktor lingkungan, yang senantiasa memengaruhi jalannya administrasi Negara di tingkat kabupaten/kota. Lingkungan sebagai faktor eksternal dalam pemerintahan kabupaten/kota sangat memengaruhi jalannya administrasi negara di tingkat kabupaten/kota. Faktor ekologi atau faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah faktor social budaya, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan-keamanan. Untuk membahas faktor-faktor

lingkungan yang memengaruhi administrasi negara seperti yang telah di kemukakan di atas, maka berikut akan dijelaskan pengaruh dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) **Faktor Sosial Budaya**, Berbicara menyangkut sosial budaya, berarti tidak dapat dilepaspisahkan dengan masyarakat yang hidup sebagai sebuah kelompok. Masyarakat yang merupakan sebuah kelompok social sebagai sebuah entity memiliki kehidupan bersama, di mana di dalamnya akan terbentuk berbagai kelompok sosial. Dalam kehidupan sebuah masyarakat yang di dalamnya ada organisasi sosial, struktur kelas dan sebagainya. Sudah tentu kelas sosial dan struktur kelas yang hidup di tengah kelompok masyarakat memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Struktur sosial yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat memiliki nilai sosial yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat tersebut.

Perubahan yang merupakan proses sosial dalam masyarakat juga akan berdampak kepada pelaksanaan administrasi negara pada umumnya dan khususnya administrasi negara pada level pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 1997, di mana kearifan lokal turut diperhitungkan dalam proses pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah baik provinsi maupun kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial budaya sebagai salah satu faktor ekologi administrasi negara sangat memengaruhi jalannya administrasi negara di level pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan administrasi Negara yang tidak dapat dilepaspisahkan dari faktor sosial budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Selain itu, di Indonesia hidup berbagai suku dan adat-istiadat yang perlu mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah. Di mana hampir sebagian besar wilayah yang faktor sosial budaya atau adat istiadat yang masih kuat pengaruhnya dalam kehidupan pemerintahan. Salah satu

pengaruh yang masih kuat adalah pembukaan atau penutupan suatu kegiatan yang bersifat nasional maupun pada tingkat lokal. Sebagai contoh: pembukaan maupun penutupan suatu kegiatan, yang terlebih dahulu mendapat ijin dari tokoh-tokoh adat setempat, dan juga pembukaan atau penutupan kegiatan selalu diiringi dengan sambutan-sambutan dan pemukulan gong atau tifa, pengguntingan pita dan lain sebagainya yang menandakan bahwa kegiatan tersebut resmi dibuka maupun ditutup. Dan bila tidak dilaksanakan acara-acara tersebut, maka kegiatan tersebut belum dapat dikatakan resmi.

Oleh sebab itu, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu menyadari hal ini dan bagaimana melakukan perubahan-perubahan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat diminimalisir sehingga biaya, waktu maupun energi tidak terbuang percuma dan bisa dioptimalkan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. (2). **Faktor Agama**, faktor agama merupakan salah satu faktor ekologi atau lingkungan administrasi negara yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan Administrasi Negara di Indonesia secara keseluruhan. Seseorang yang memiliki nilai-nilai agama akan dapat membentuk moral dan akhlak yang baik. Dengan demikian akan berdampak pada pelaksanaan Administrasi Negara khususnya dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dengan moral dan akhlak yang baik pasti dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat akan dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu dalam rekrutmen pegawai atau pejabat selalu harus memenuhi salah satu persyaratan yakni “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Persyaratan tersebut mengharuskan setiap pegawai atau pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat

dilaksanakan dengan baik karena yang dilayani adalah masyarakat (manusia). Di sisi lain dalam pelaksanaan administrasi negara terlihat faktor agama sangat berpengaruh. Hal ini ditandai dengan pemberian libur untuk melaksanakan hari-hari besar keagamaan maupun ada pemberian toleransi kepada masyarakat yang beragama Islam untuk melaksanakan puasa. Dengan pemberian libur maupun pemberian toleransi dalam hubungannya dengan keagamaan memang sangat memengaruhi jalannya Administrasi Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, di mana hari yang seharusnya disiapkan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat akan tertunda karena harus libur. 3Faktor Politik, keterkaitan faktor politik dalam ekologi Administrasi Negara sangat erat dan faktor politik tidak dapat dilepaspisahkan dari Administrasi Negara. Dapat dikatakan demikian karena politik merupakan pangkal tolak dari Administrasin Negara dan Administrasi Negara merupakan kelanjutan dari proses politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Woodrow Wilson (1974), administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya. Dapat dikatakan bahwa berbicara menyangkut politik berarti berbicara tentang kekuasaan karena orientasi dari politik adalah kekuasaan. Oleh sebab itu dalam hal mempelajari politik pada sebuah Negara berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan yang ada di dalamnya.

Dalam kehidupan Administrasi Negara diatur bagaimana pola hubungan antara lembaga-lembaga kekuasaan ini. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan legislatif yang merupakan representative dari rakyat, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat mengefektifkan kekuasaan. Sesuai dengan tujuan dari Administrasi Negara adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ditunjang dengan situasi atau kestabilan politik dalam suatu Negara. Administrasi Negara yang dijalankan

oleh para birokrat, sangatlah dipengaruhi ketika terjadinya konflik kepentingan politis yang meliputi pemerintahan yang akan berimplikasi dengan mandegnya agenda formulasi kebijakan yang telah direncanakan. Formulasi kebijakan merupakan rumusan dari berbagai janji politik pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, maupun calon bupati dan wakil bupati ketika melaksanakan kampanye dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun kepala dan wakil kepala daerah di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

#### 1. Faktor Ekonomi

Sesuai pasal 33 UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar perekonomian Indonesia sangat penting untuk dimaknai dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menuju kemakmuran di bidang ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dan juga sangat dibutuhkan koperasi dari masyarakat sebagai modal utama dalam pembangunan ekonomi. Bannock, Graham, Baxter dan Davis (2004) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara.

Administrasi Negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas/pemerintahan agar terwujud efisiensi dalam tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintah negara tersebut.

Administrasi Negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sangat berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber

daya/alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pada hakekatnya administrasi negara berarti keterlibatan negara dalam masyarakat. Orientasi administrasi negara adalah non-profit.(3)**Faktor Hukum**, dalam pelaksanaan pelayanan publik sangat diperlukan upaya penegakan hukum atau Law Enforcement sehingga masyarakat yang mendapatkan layanan dari pemerintah akan mendapatkan sebuah kepastian hukum dalam hubungannya dengan layanan yang diterima.

Soekanto (2008:5) mengemukakan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai makna yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut : (a)Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;(b)Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;(c)Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;(d)Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;(e)Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dengan demikian dalam hubungannya dengan pelaksanaan administrasi negara penegakan hukum sangat diperlukan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga aparat dalam memberikan pelayanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan memiliki kepastian hukum. Khususnya pelaksanaan administrasi Negara di tingkat pemerintah daerah perlu ada penegakan hukum yang memadai karena proses pemberian layanan lebih banyak pada tingkat daerah terkhusus dalam hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara dilaksanakan.(4) **Faktor Pertahanan dan Keamanan**, faktor pertahanan dan keamanan juga merupakan salah satu faktor ekologi yang turut mempengaruhi jalannya Administrasi Negara baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kabupaten/kota. Sejak kemerdekaan

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 militer memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya administrasi Negara dapat berjalan dengan baik apabila Negara dalam keadaan aman, dan di sini peran militer dalam menjaga kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu peran militer juga masih diperlukan dalam pelaksanaan sistem administrasi Negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Riduan (2007) mengemukakan bahwa adanya pengaruh timbal balik antara Administrasi publik terhadap Militer Hankam dapat tampak pada 2 hal sebagaimana di bawah ini. Pertama, karena anggota militer sewaktu-waktu harus siap bertugas di luar jajaran Departemen Hankam, maka diperlukan kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan yang dimaksud. Oleh karenanya, perlu adanya orientasi kepada kurikulum pendidikan militer agar dapat dihasilkan militer yang memiliki kemampuan untuk penugasan di luar hankam. Kedua, pelaksanaan sishankamrata, memerlukan pengarah kekuatan rakyat, rakyat perlu dilatih dan diorganisir dalam kelompok yang sewaktu-waktu dapat digerakkan untuk menghadapi tugas hankamrata.

Adapun faktor faktor ekologi menurut pendapat yang lain diantaranya menurut Prof. Fred. W. Riggs dalam Engkus, E. (2017), Ekonomi; Sosial; Symbol; Komunikasi; dan Politik.

### **Pengaruh Faktor Ekologi (Agama) Terhadap Etika Pelayanan Administrasi Publik**

Dari uraian faktor – faktor ekologi di atas, peneliti mengambil salah satu faktor untuk diteliti yaitu faktor agama yang menjadi salah satu aspek penting khususnya dalam pelayanan publik. Peran Etika Dalam Pelayanan Publik Sesuai Pembangunan Daerah di Kecamatan Dau Malang dikatakan sudah maksimal. pembangunan dapat dijalankan dalam dua sisi sekalian yaitu pembangunan infrastruktur

maupun pembangunan sumber daya manusia dan juga cukup memenuhi prinsip- prinsip pembangunan Daerah.

Etika pelayanan perspektif Islam bisa di lihat dari pelayanan prima yang di berikan kepada wajib pajak, di mulai dari karakteristik pelayanan dan juga etika pelayanan. Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda, " Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik-baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan (menghormati) tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan (menghormati) tamunya." (*Riwayat Bahra dan Muslim*)

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya: “Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya”. Semua ini menunjukkan bahwa etika pelayan dalam pespektif Islam tidak bisa lepas, karna untuk melayani dengan baik seorang petugas harus memiliki kejujuran, bertanggung jawab, dapat di percaya, tidak menipu, melayani dengan khitmah dan juga tidak melupakan akhirat. Abdalla Hanafy dan Hamid Salam, masing-masing adalah guru besar marketing dan International Business di St. Cloud State University dan guru besar Business Administration di Mankata State University, Karim (2001) merumuskan etika pelayanan Islam sebagai berikut:

- (1) Etika ,untuk selalu menyampaikan yang benar,
- (2) Etika, untuk selalu dapat dipercaya.
- (3) Etika, untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas.
- (4) Etika persaudaraan.
- (5) Penguasaan ilmu pengetahuan.
- (6) Etika keadilan.

Etika pelayanan publik menjadi suatu bahan untuk diteliti. Etika Dalam Pelayanan Publik Terhadap di Kecamatan Dau Malang secara keseluruhan Peran Etika dalam



pelayanan publik sudah bisa diterapkan dengan baik, dapat digambarkan bahwa peran etika deskriptif maupun normatif sudah dapat terlihat dan juga memenuhi asas- asas pelayanan publik, dan juga telah memenuhi Etika organisasi maupun individu dalam pola dan kegiatan pelayanan yang ada di *Kecamatan Dau, Malang*.

Hal yang perlu diketahui dalam hal etika adalah tindakan manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Dalam hal ini, tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai macam norma yang ada dalam masyarakat kita seperti norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan lain- lain.

**Tabel 1. Data Jumlah Penduduk (Kecamatan Dau, Malang)**

DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG					
NO	DESA/KELURAHAN	PENDUDUK		JUMLAH	JUMLA HKK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Sumbersekar	3.620	4.054	7.674	2.560
2	Mulyoagung	7.435	7.230	14.665	4.222
3	Landungsari	5.113	5.215	10.328	4.380
4	Kalisongo	4.183	4.023	8.206	2.134
5	Karangwidoro	3.137	2.979	6.116	1.863
6	Tegalweru	1.742	1.837	3.579	1.082
7	Gadingkulon	2.045	2.017	4.062	1.270
8	Selorejo	1.869	1.893	3.762	1.214
9	Petungsewu	1.720	1.706	3.426	1.200
10	Kucur	3.017	2.992	6.009	1.908
J U M L A H		33.881	33.946	67.827	21.833

Sumber: web.kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Kecamatan Dau sebagai satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis *S W O T ( Strengths . Weaknesses , Opportunities, Treaths)*.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang

upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan kecamatan Dau tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Malang, maka berdasarkan rancangan RPJM Kabupaten Malang 2011-2015 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dau adalah : meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset Serta kesejahteraan sosial, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

## PENUTUP Kesimpulan

Pada kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan hasil penelitian literature pada beberapa artikel dan jurnal bahwa salah satu factor ekologi administrasi publik yaitu faktor agama yang memang berpengaruh terhadap suatu etika pelayanan publik yang ada dalam administrasi dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya begitupun ketika ilmu administrasi diadopsi sebagai sebuah sistem pemerintahan hingga pada tingkat daerah. Oleh sebab itu, lingkungan sebagai faktor eksternal sangat mempengaruhi jalannya suatu administrasi Negara. Faktor ekologi atau faktor lingkungan yang dimaksud adalah sosial budaya, agama, ekonomi, politik, hukum hingga faktor pengaruh pertahanan dan keamanan.

## Saran

Oleh sebab itu, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu menyadari hal ini dan berbagai pertimbangan dalam melakukan perubahan-perubahan sehingga pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan akurat supaya segala kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Aridhaya. M. Rendi. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. Universitas Surya Kencana. Cianjur
- [2] Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
- [3] Fakhsiannor. 2016. Analisis Faktor Ekologi terhadap Administrasi Negara dalam Transformasi Administrasi Modern. Banjarmasin: UNISKA.
- [4] Iqbal. Muhammad. 2018. Ekologi Administrasi Negara. Administrasi Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Tabalong.
- [5] Kasmawati. 2018. Pengaruh Etika Pelayanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Di Kabupaten Wajo. Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin, Makassar.
- [6] Mulyanti. Risna. 2015. Pertumbuhan Ekologi Administrasi Negara. <https://risnamulyanti.blogspot.com>
- [7] Nau, Y.M, Dkk. 2012. Peran Etika Dalam Pelayanan Publik Sesuai Pembangunan Daerah. JISIP. Vol 1(1).
- [8] Palijama, F. 2014. Faktor Ekologis dalam Administrasi Negara dengan Pelayanan Publik. Ambon: STIA Alazka.
- [9] Ririhena, Samel W. 2017. Faktor Ekologi Administrasi Negara dalam Konteks Pemerintahan Daerah. Merauke: Universitas Musamus.
- [10] Sondang P. Siagian. 1976. Administrasi dan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- [11] Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk). JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (4), 1-16.